



## Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Jual Beli *Account Netflix* Premium Secara Ilegal

Ni Made Tessa Aprillia Dewi<sup>1</sup> | I Nyoman Putu Budiarta<sup>1</sup> | Ni Made Puspasutari Ujjanti<sup>1</sup>

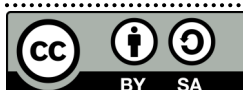
1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Ni Made Tessa Aprillia Dewi, Fakultas  
Hukum, Universitas Warmadewa  
Email address:  
[tessaaprillia6@gmail.com](mailto:tessaaprillia6@gmail.com)

**Abstract**—Netflix as a subscription streaming service for watching entertainment. Currently Netflix is not only used as a means of entertainment, but also used as a business object such as the sale of illegal Netflix accounts that harm copyright holders, and result in legal consequences for the perpetrators. The problem is 1. What are the legal consequences of the illegal sale of premium Netflix accounts that harm copyright holders? 2. What is the form of legal protection that can be given to the illegal sale and purchase of premium Netflix account? Finding out how big the impact of Netflix copyright infringement is and what laws are applied to prevent the unlawful sale of Netflix accounts are the two main objectives of this research. The method used in this research is normative legal research method. The legal consequences of selling illegal premium Netflix accounts are copyright infringement and violation of ITE law. Netflix as a creation that gets protection under copyright law while legal protection to account users from illegal sellers cannot be given and does not meet the objective requirements for the validity of an agreement, according to Article 1320 of the Civil Code paragraph (4), namely a *halal* cause.

**Keywords:** Netflix; illegal; legal protection



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Netflix adalah layanan streaming berlangganan yang memungkinkan para pengguna menonton acara televisi dan film melalui perangkat yang terhubung ke internet. Tergantung pada jenis paket yang pengguna pilih, pengguna dapat mengunduh acara televisi dan film ke perangkat IOS, Android, *Windows 10 untuk menonton tanpa harus terhubung ke internet. Selain itu, salah satu keunggulan Netflix* adalah tayangan tanpa iklan, sehingga pelanggan dapat menonton program televisi atau film yang pengguna inginkan tanpa gangguan. Namun seiring berjalannya waktu keberadaan Netflix tidak hanya dijadikan sarana hiburan atau entertainment, tetapi juga dijadikan objek bisnis yang digunakan oleh beberapa pihak. Bisnis yang dijalankan oleh beberapa pihak atau oknum-oknum yang menjual account Netflix premium ilegal dengan harga rendah atau murah dan banyak diminati oleh pengguna/pembeli account Netflix premium ilegal.

Penjualan *account Netflix premium* ilegal sering penulis jumpai dalam beberapa aplikasi seperti Shopee, Instagram, Twitter atau untuk saat ini sudah berganti nama menjadi aplikasi X dan beberapa aplikasi lainnya. Oknum penjualan account *Netflix premium* secara ilegal melalui layanan *Over The Top (OTT)* mencakup beberapa pelanggan *Netflix* berlangganan secara resmi yang telah menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh pihak Netflix. Pihak atau penjual akan memanfaatkan fitur yang telah disediakan oleh aplikasi Netflix untuk membuat akun dimana setelah akun dibuat, penjual akan menyediakan 2-5 profil yang dapat digunakan oleh 1 user atau bahkan hingga 5 user yang berbeda. Setelah itu penjual akan menjual profil yang telah dibuat ini kepada pihak lain, baik dalam bentuk akun bersama (*sharing account*) maupun akun pribadi (*private account*) dengan menawarkan biaya yang sangat rendah, sehingga menarik minat pembeli yang ingin menikmati layanan Netflix dengan harga murah. Dengan demikian, tindakan itu bukan hanya ilegal tetapi juga merugikan pemegang hak cipta, dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi para pelaku tindakan ilegal ini. permasalahannya adalah 1). Bagaimanakah akibat hukum terhadap penjualan account Netflix premium ilegal yang merugikan pemegang hak cipta? 2). Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada layanan jual beli *account* Netflix premium ilegal?

## 2. Metode

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya”. Selain itu, analisis fakta hukum secara menyeluruh juga perlu dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang memunculkan fenomena hukum (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang penulis gunakan. Selain teknik perundang-undangan atau statute approach, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Buku Hukum. Hukum perdata menjadi sumber ilmu utama penulis dalam penelitian ini. Buku-buku hukum, jurnal hukum yang menyajikan konsep atau asas dasar hukum, pendapat (doktrin) para ahli hukum, temuan penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum adalah beberapa contoh publikasi hukum sekunder. Serta menggunakan bahan-bahan tersier, khususnya kamus bahasa, kamus umum, ensiklopedia umum, bahkan bahan-bahan yang diperoleh melalui internet.

## 3. Pembahasan

### Akibat Hukum Terhadap Penjualan Account Netflix Premium Ilegal Yang Merugikan Pemegang Hak Cipta

Dalam era digital yang terus berkembang, kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berlangganan aplikasi berbayar untuk menikmati berbagai hiburan melalui platform streaming. Salah satu layanan hiburan yang paling banyak digunakan dan disukai di semua kelas sosial adalah Netflix. Dengan berbagai konten yang berkualitas dan beragam, Netflix telah berhasil menarik perhatian banyak orang yang mencari hiburan. Dengan demikian, platform ini mencerminkan perubahan tren konsumsi hiburan yang semakin beralih ke layanan digital, menciptakan paradigma baru dalam cara masyarakat mengakses dan menikmati konten hiburan di era modern ini. Netflix adalah penyedia layanan yang diakui secara hukum yang menawarkan streaming serial televisi dan film yang sah. Agar Netflix dapat melakukan streaming serial TV, film fiksi, dokumenter, dan jenis konten lainnya, pemilik hak cipta harus membayar biaya. (Widiananda, hal. 43).

Hak ekonomi dan moral bergabung membentuk hak eksklusif. Hak moral adalah hak yang selamanya menjadi milik Sang Pencipta atau pemegang hak terkait lainnya. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan untuk menggunakan nama aslinya atau nama samaran sehubungan dengan penggunaan publik atas ciptaannya, untuk mengubahnya agar sesuai dengan norma-norma sosial, dan untuk mengubah judul dan sub pos. penciptaan dan melindungi hak-haknya apabila ciptaan tersebut diubah, dimutilasi, atau diputarbalikkan dengan cara apa pun yang dapat membahayakan martabat atau nama baik seseorang. Di sisi lain, hak ekonomi adalah hak yang menjamin pencipta atau pemegang hak cipta sejumlah persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari karyanya. Hal ini memberikan pemilik hak cipta kewenangan hukum untuk mengenakan biaya atas aktivitas berikut: menampilkan, menerbitkan, mereproduksi, menerjemahkan, mengadaptasi, merakit, atau mengubah ciptaan; mendistribusikan karya atau salinannya; memajang karya; mengumumkan pekerjaan; mengkomunikasikan pekerjaan; dan menyewakan hasil karyanya (Lalamentik, 2018, hal. 13). Program komputer seperti aplikasi berbayar lebih banyak diminati karena menyediakan layanan yang lebih komprehensif dan unggul dibandingkan dengan aplikasi gratis. Namun, kendala muncul ketika proses pembayaran sulit dan biayanya cukup mahal menjadi hambatan bagi pengguna yang ingin mengakses aplikasi berbayar tersebut. Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, beberapa pihak di luar platform resmi aplikasi menawarkan solusi melalui media sosial dengan menjual secara ilegal program aplikasi berbayar. Contohnya adalah penjualan account Netflix yang dipromosikan melalui media sosial atau melalui teman, dimana harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan harga resmi dan proses pembayarannya lebih mudah.

Pembajakan dapat didefinisikan sebagai penjualan ilegal layanan Netflix oleh pedagang tidak terafiliasi melalui jaringan media sosial. Yang dimaksud dengan “pembajakan” adalah reproduksi tanpa izin atas suatu ciptaan atau produk hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta. serta penyebarluasan komoditas yang dihasilkan untuk kepentingan komersial. Penjual tidak sah ini menggunakan media sosial untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan karya mereka, yang mungkin dianggap sebagai tindakan pembajakan perangkat lunak aplikasi Netflix. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Segala akibat yang diakibatkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap obyek hukum, serta segala akibat tambahan yang ditentukan atau dianggap mempunyai akibat hukum oleh undang-undang yang bersangkutan, secara bersama-sama disebut akibat hukum. Karena konsekuensi hukum tersebut, subjek hukum diberkahi dengan hak dan kewajiban. Sebagaimana disampaikan (Rusli Tami 2017), pada halaman 100, “dampak hukum” adalah akibat dari suatu kejadian hukum. Van Apeldoorn mendefinisikan suatu kejadian hukum sebagai suatu kejadian yang berdasarkan hukum dan menimbulkan atau menghilangkan suatu hak. Istilah “peristiwa hukum” dapat merujuk pada suatu kejadian sosial yang akibat-akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum tersebut merupakan suatu peristiwa sosial yang mengawali suatu kaidah hukum tertentu, sehingga membuahkan hasil ketentuan-ketentuannya (Lembang, 2023, hal. 49). Akibat hukum yang ditimbulkan Penjual account Netflix ilegal melalui platform media sosial maupun e-commerce telah melakukan pelanggaran dengan menjual kembali akun yang telah dibeli kepada orang lain secara sharing account maupun private account. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUHC yang mengatur tentang penggandaan dan penyebarluasan hasil penggandaan ciptaan tanpa izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3), perbuatan tersebut termasuk penggandaan atau pembajakan. Berdasarkan

perbuatan penjual akun Netflix Premium ilegal yang menggandakan akun yang telah dibuat melalui situs resmi dan menjualnya kembali di media sosial atau e commerce, Oleh karena itu, Pasal 113 ayat (4) mengatur bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pembajakan dan melanggar pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dengan sengaja dan tanpa persetujuan pemegang hak cipta, penjual akun Netflix yang tidak sah mendistribusikan dan menjual akun tersebut sebagai duplikat dokumen elektronik yang dijual kepada pengguna lain sehingga mereka dapat menggunakan akun tersebut dan mengakses aplikasi Netflix sebagai sistem elektronik. Peraturan tambahan yang dilanggar dalam transaksi akun Netflix ilegal termasuk peraturan pengguna pribadi, yang menyatakan bahwa data dan informasi terdaftar hanya boleh digunakan secara internal atau untuk keuntungan pribadi dan tidak boleh dijual atau diberikan kepada pihak luar. Selain itu, ada batasan non-komersial yang dilanggar, yaitu ketika jasa digunakan untuk mencari keuntungan atau untuk dijual. Dampak hukum atas penjualan akun premium Netflix tanpa izin, yang merugikan pemegang hak cipta, termasuk pelanggaran hak cipta dan pelanggaran undang-undang ITE, yang dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata. Hingga saat ini, Netflix belum mengumumkan kebijakan atau tindakan apa pun untuk mengatasi pelanggaran akun publik terkait pembelian dan penjualan Netflix Premium. Sedangkan untuk pelanggaran hak cipta pada akun Netflix Premium, sebelumnya Netflix telah melarang aktivitas mencurigakan, namun hal ini masih menjadi masalah yang harus diatasi karena merugikan pencipta dan/atau pemegang hak Netflix.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Layanan Jual Beli Account Netflix Premium Ilegal**

Menurut etimologinya, “perlindungan” mengacu pada perlindungan dan tindakan mempertahankan (Budiartha, 2016). Perlindungan hukum mengacu pada serangkaian inisiatif yang diterapkan dalam sistem hukum suatu negara dengan tujuan utama membela kebebasan, hak, dan kepentingan orang atau kelompok sosial. Perlindungan hukum tidak hanya merinci kepada hak-hak individu, tetapi juga menetapkan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menjaga keadilan dan keseimbangan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum internal merujuk pada bentuk perlindungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang disusun oleh setiap pihak yang terlibat. Setiap pihak secara independen merancang klausa-klausa atau konten perjanjian tersebut, yang kemudian menjadi dasar bagi perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Tujuan utama dari pembuatan perjanjian adalah untuk memastikan bahwa kepentingan masing-masing pihak dipertimbangkan berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum yang diberikan melalui perjanjian ini akan terwujud jika kedudukan para pihak yang terlibat dianggap sejajar sehingga menciptakan keseimbangan yang adil.

Netflix telah menerapkan langkah perlindungan hukum internal, yang mencakup beberapa klausul dalam syarat dan ketentuan di bagian 4.6. Sesuai dengan semua undang-undang, peraturan, dan regulasi yang relevan, atau tanpa menghalangi penggunaan layanan atau kontennya oleh orang lain, pelanggan berkomitmen untuk menggunakan layanan Netflix, beserta semua fitur dan fungsi terkait, sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini. Dengan menyampaikan keluhan melalui kolom Klaim Pelanggaran Hak Cipta di situs resmi Netflix ([Netflix.com/copyrights](https://www.netflix.com/copyrights)), *pengguna dapat mencari jalur hukum sebagai respons atas pelanggaran hak cipta pada program aplikasi dan layanan streaming. Oleh karena itu, Netflix memiliki keleluasaan penuh atas hak layanan aplikasi dan dapat mengubah atau menghapusnya kapan pun diinginkan.* Penggunaan Merek Netflix dapat mengakibatkan tindakan hukum jika melanggar hukum apa pun, melanggar kekayaan intelektual atau hak lain apa pun yang dimiliki atau dilisensikan oleh Netflix, atau tidak mematuhi persyaratan atau perjanjian khusus Netflix. Siapapun yang mengetahui bahwa konten yang melanggar tersedia melalui layanan Netflix atau bahwa karya orang lain telah direproduksi dan didistribusikan dengan cara yang melanggar hak cipta dapat mengajukan keluhan melalui situs [Netflix.com/copyrights](https://www.netflix.com/copyrights) (Widiananda, hal. 53).

Perlindungan hukum terhadap aplikasi Netflix terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang mengatur tentang bagian-bagian program komputer yang memerlukan perlindungan. Undang-Undang Hak Cipta mengakui Netflix sebagai contoh penemuan yang dilindungi, khususnya di bidang program komputer. Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta memberikan daftar istilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan teori di balik perangkat lunak ini. Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta melindungi hak Netflix sebagai lembaga penyiaran berbayar dengan hak terkait, selain haknya sebagai program komputer. Hak Pelanggan dalam transaksi E-Commerce dalam negeri di Indonesia diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang melindungi hak cipta, paten, dan merek, serta perlindungan konsumen, telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Sebuah gambaran yang sangat baik tentang bagaimana upaya perlindungan konsumen nasional dilaksanakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Terbatasnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka merupakan kelemahan utama yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan konsumen. Tidak mungkin dipisahkan secara hukum mengenai gagasan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata karena tidak ada ketentuan tegas yang mengatur tentang perjanjian jual beli *online*. Agar dapat mengikat secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua pihak harus sepakat agar suatu perjanjian dapat mengikat secara hukum. Pokok permasalahannya harus didefinisikan, dan para pihak harus bertanggung jawab atas tujuan mereka. Dalam menyusun suatu perjanjian, persyaratan hukum perjanjian merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dan dipenuhi. Perjanjian menjadi batal jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi. Dapat pula dibatalkan apabila timbul peristiwa-peristiwa yang menimbulkan akibat-akibat tertentu dalam hubungan kontraktual dan membuat perjanjian seolah-olah tidak pernah terjadi. Pasal 1320 KUHPerdata mengulas keabsahan perjanjian jual beli langganan Netflix premium. Menurut penulis, penyedia jasa tidak bermaksud untuk memenuhi tugasnya berdasarkan ketentuan perjanjian dengan penyedia jasa. Penyedia layanan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Netflix, yang mengikat semua pihak secara hukum. Perjanjian penyedia jasa dan pengguna jasa tidak memenuhi syarat keabsahan yang keempat karena tidak halal. Oleh karena itu, perjanjian bersama dianggap batal demi hukum dan tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, tidak mungkin memberikan perlindungan hukum kepada pengguna akun dari oknum vendor, juga tidak memenuhi syarat obyektif yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat berlaku efektif, sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal 1320 KUH Perdata.

#### 4. Simpulan

Akibat hukum terhadap penjualan account Netflix premium ilegal yang merugikan pemegang hak cipta yaitu mencakup pelanggaran hak cipta dan pelanggaran undang-undang ITE yang dapat menimbulkan sanksi pidana dan perdata. Kerugian yang ditimbulkan dari penjualan ilegal akun Netflix yaitu mencakup potongan pendapatan yang seharusnya diterima oleh Netflix dari pelanggan resmi. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial tetapi juga menghambat kemampuan perusahaan untuk terus menciptakan konten baru dan meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan. Netflix sebelumnya telah melarang aktivitas mencurigakan, namun belum mengumumkan kebijakan atau tindakan apa pun seputar pembelian dan penjualan akun Netflix Premium yang melanggar hukum oleh masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada layanan jual beli account Netflix premium ilegal yaitu Netflix sebagai salah satu hasil ciptaan yang mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang Hak Cipta, diakui sebagai ciptaan yang dilindungi terutama dalam bentuk sebagai program komputer. Selain sebagai program komputer, hak-hak Netflix juga mendapatkan perlindungan sebagai lembaga penyiaran berbayar dengan hak-hak terkait, sesuai pedoman Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ½ Angka 5. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ayat (4) yaitu alasan yang sah, maka tidak mungkin memberikan perlindungan hukum kepada pengguna akun. terhadap penjual yang melanggar hukum, juga tidak memenuhi persyaratan objektif sahny suatu perjanjian.

## Daftar Pustaka

- Budiarta, I. N. (2016). *Hukum Outsourcing : Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum, Vol.6, No.6*.
- Lembang, A. R. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia*. Universitas Bosowa: Doctoral dissertation.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataram University Press.
- Tami, R. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Widiananda, B. S. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal melalui Media Sosial*. Fakultas Ilmu Hukum: Doctoral dissertation.